

KEBIJAKAN JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN SEBAGAI BENTUK KOMITMEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

Ahmad Kamil¹, Khoirul Anam², Hesty Ramdhani Meita Murinda³

¹Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO Box. 02 Kamal Bangkalan Jawa Timur
Email: ahmad_kamil@trunojoyo.ac.id

²Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lamongan, Jl. Basuki Rahmad No.1 Lamongan
Email: bidanglitbang.lamongan@gmail.com

³Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lamongan, Jl. Basuki Rahmad No.1 Lamongan
Email: rinda.abella@gmail.com

ABSTRAK

Jalan merupakan salah satu obyek mengenai percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula). Program ini muncul sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sebagai upaya penanganan perbaikan jalan, khususnya di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi dari Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula), sehingga kedepan dapat menjadi landasan kebijakan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dengan jumlah surveyor 80 orang yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan dengan total responden sebanyak 840 orang yang ditentukan menggunakan metode *stratified cluster random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan sudah berjalan dengan baik dan mampu menjawab harapan besar masyarakat Kabupaten Lamongan. Sebanyak 87,14 % warga Kabupaten Lamongan berpendapat bahwa program ini perlu dilanjutkan, Menurut pendapat Masyarakat sebanyak 39,04% kondisi jalan masih belum dicor atau aspal dan sebanyak 26,20% kondisi jalan yang sudah dicor dalam kondisi sudah berlubang dan rusak. Sehingga harapannya dengan output dari penelitian ini, pemerintah dapat memiliki skala prioritas yang tepat dalam melakukan pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan. Sehingga besar harapannya seluruh jalan di wilayah Kabupaten Lamongan dapat terwujud menjadi jalan yang mantap dan alus sesuai dengan nama program tersebut.

Kata kunci: Jalan, Pemerintah, Evaluasi,

ABSTRACT

Roads are one of the objects regarding the acceleration of infrastructure development which is the main focus in government. This research was conducted on the basis of the Jalan Mantap and Alus Lamongan (Jamula) program. This program emerged as a priority program for the Lamongan Regency Government and as an effort to handle road repairs, especially in Lamongan Regency. This research aims to determine the implementation of the Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula) Program, so that in the future it can become the basis for appropriate policies. The research method used is quantitative using data collection techniques in the form of interviews, with a total of 80 surveyors spread across 27 sub-districts throughout Lamongan Regency with a total of 840 respondents determined using the stratified cluster random sampling method. The results of this research show that the implementation of the Jalan Mantap and Alus Lamongan Program has gone well and is able to answer the high hopes of the people of Lamongan Regency. As many as 87.14% of Lamongan Regency residents think that this program needs to be continued. According to the community's opinion, 39.04% of the roads are still not cast or asphalted and as many as 26.20% of the roads that have been cast are in a condition of holes and damage. So the hope is that with the results of this research, the government can have the right priority scale in carrying out road construction in Lamongan Regency. So the big hope is that all roads in the Lamongan Regency area can become stable and smooth roads in accordance with the name of the program.

Keywords: Roads, Government, Evaluation,

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yang menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan demi menunjang roda perekonomian agar bisa lebih cepat bergerak dalam rangka mensejahterahkan masyarakat. Jalan di Kabupaten Lamongan diketahui mempunyai tantangan dimana kondisi seperti faktor alam seperti struktur tanah dan bencana alam seringkali menyebabkan jalan yang sudah dibangun mengalami kerusakan yang lebih cepat dari biasanya dibandingkan di wilayah lainnya. Selain faktor alam, umur konstruksi jalan serta adanya peningkatan volume dan tonase kendaraan membuat kondisi jalan haruslah mendapatkan perhatian lebih dalam pemeliharaan hingga pembangunannya agar tidak menyebabkan permasalahan lain seperti arus lalu lintas yang tidak lancar hingga kecelakaan.

Kinerja pemerintahan dan kepemimpinan Kepala Daerah (termasuk Bupati) adalah proses yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi sebagai bagian dari evaluasi baik dalam proses maupun hasilnya. Kajian efektivitas merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan evaluasi kinerja pemerintahan dan kepemimpinan daerah Kabupaten Lamongan, terutama sehubungan dengan Upaya mewujudkan program peningkatan kualitas infrastruktur melalui program jalan mantap dan alus Lamongan atau yang populer disebut sebagai program Jamula.

Sudah masanya mengukur kinerja pemerintahan dan kepemimpinan daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji. Sebagai salah satu aspek penting dalam melihat dinamika penyelenggaraan pemerintahan terbaru secara regional (kabupaten), kajian efektivitas bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan evaluasi yakni (1) memetakan tingkat kepuasan atas program jamula yang telah terlaksana di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan Masyarakat dalam perbaikan program jamula untuk tahun berikutnya; (3) dan mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah saat ini dan variabel-variabel lainnya sehubungan dengan Program Jamula.

Program jalan mantap dan alus Lamongan atau yang populer disebut sebagai program Jamula merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan. sejak dipimpin oleh Bupati Lamongan yang baru pada tahun 2021 pekerjaan rumah terbesar pemerintah ialah memperbaiki infrastruktur, terutama Jalan di Kabupaten Lamongan. Salah satu tujuan dari pembangunan infrastuktur jalan ialah untuk memperlancar penyaluran barang dan jasa, serta memiliki peran dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan data yang dihimpun, tidak seluruh permukaan jalan di Kabupaten Lamongan menjadi bagian dari kewenangan kabupaten, dari total permukaan jalan sepanjang 551,083km jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamongan ialah sepanjang 416,116km, sedangkan provinsi sepanjang 68,517km, dan negara sepanjang 66,45km. kondisi jalan di lamongan memang menjadi persoalan yang secara turun temurun dari pemerintahan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2018-2020 jalan di kabupaten Lamongan cukup Panjang yang dalam keadaan rusak dan rusak berat. Tahun 2018 jalan dalam keadaan rusak berat sepanjang 19,85 km, Tahun 2019 sepanjang 23,65 km, dan Tahun 2020 sepanjang 28.5 Km. sedangkan jalan dalam keadaan rusak tahun 2018 sepanjang 43,7km, tahun 2019 sepanjang 43,7km dan tahun 2020 sepanjang 16,5km.

Tahun 2019 Indonesia terjangkit wabah pandemi *covid-19* yang baru berakhir pada tahun 2023 yang diputuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023, tentu akibat pandemi *covid-19* tersebut berdampak kepada konsentrasi anggaran di tingkat Kabupaten, termasuk Lamongan, sehingga progres atas upaya perbaikan infrastruktur menjadi terhambat, sehingga keadaan jalan berdasarkan kondisinya pada tahun 2021-2022 di kabupaten lamongan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2021 jalan dalam keadaan rusak sepanjang 35,7km dalam keadaan rusak berat sepanjang 48,85km, sedangkan pada tahun 2022 jalan dalam keadaan rusak sepanjang 21,25km dalam keadaan rusak berat sepanjang 90,11km.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, dengan melaksanakan observasi awal

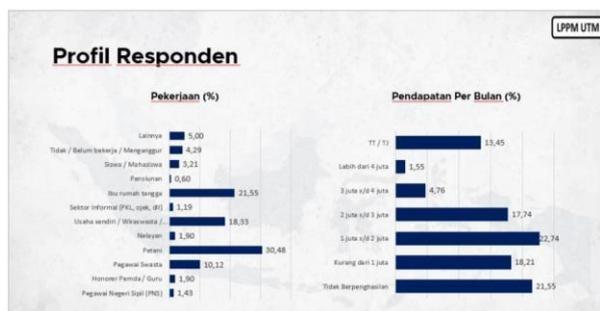
guna mendapatkan gambaran mengenai kebijakan infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Lamongan, kemudian melakukan penyusunan kajian teori dan peraturan-peraturan terkait sehingga dapat dilanjutkan dengan melakukan penyusunan kuisioner. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder terkait profil infrastruktur di Kabupaten Lamongan.

Penentuan populasi dan membuat sample populasi dengan metode *Stratified cluster random sampling* hingga terpilih sebanyak 840 sample yang representatif. Proses penggalan data ini dilakukan oleh 80 tenaga survey yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan. Keseluruhan sample tersebut kemudian dilakukan wawancara menggunakan kuisioner yang telah disusun. Keseluruhan data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan pengolahan dan akan menghasilkan kesimpulan terhadap pelaksanaan program Jamula di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Responden

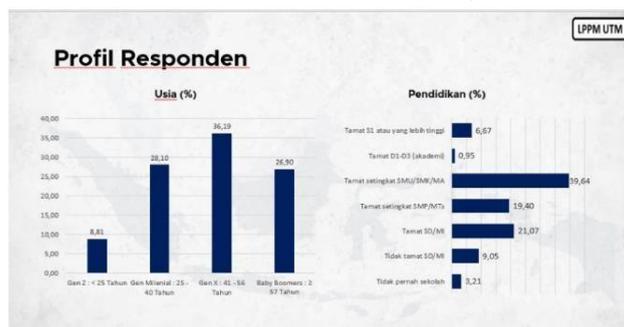
Penelitian kali ini tentu dengan profil responden yang bermacam-macam latar belakangnya, Dilihat dari sisi usia dan tingkat Pendidikan, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat usia dan Pendidikan yang beragam. Dari 840 responden yang disurvei, komposisi paling sedikit adalah responden Gen Z yaitu 8,81 % atau 74 responden. Kemudian disusul oleh responden Generasi Millennial sebanyak 28,10 % atau 236 responden. Responden generasi Millennial ini jumlahnya hampir sama dengan generasi Baby Boomers, yakni sebanyak 26,90 % atau 219 responden. Sementara yang terbanyak adalah responden dari generasi X yakni sebanyak 36,19 % atau sekitar 304 responden.



Gambar 1 : Usia dan Pendidikan Responden

Dari aspek tingkat Pendidikan, mayoritas responden adalah penduduk dengan tingkat Pendidikan setingkat SMA dan sederajat yakni 39,64 % atau 333 responden. Disusul kemudian responden dengan Pendidikan tamatan SD dan

sederajat yakni 21,07 % atau 177 responden. Sementara diurutan ketiga adalah responden dengan Pendidikan tamatan SMP dan sederajat yakni sebesar 19,40 % atau 163 responden. Yang menarik adalah dari seluruh responden yang telah disurvei adalah terdapat responden berpendidikan tamatan S1 atau lebih tinggi hanya sebesar 6,67 %. Penduduk dengan tingkat Pendidikan ini menempati peringkat ketiga terbawah diatas responden yang tidak pernah sekolah (3,21%) dan tidak tamat SD atau sederajat.



Gambar 2. Pekerjaan dan Pendapatan Perbulan Responden

Sementara dari sisi pekerjaan dan juga pendapatan terdapat beberapa hal perlu diperhatikan. Terdapat tiga pekerjaan yang mendominasi jenis pekerjaan dari responden, antara lain yang terbanyak petani sebanyak 30,48%, kemudian disusul dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 21,55% dan yang ketiga adalah usaha sendiri atau wiraswasta sebanyak 18,33 %. Selain itu juga didapatkan responden yang bekerja sebagai nelayan (1,90%), Honorar Pemda/Guru (1,90%), PNS (1,43%). Ditemukan juga responden yang mengaku sebagai Mahasiswa sebanyak 3,21% dan bahkan ditemukan responden yang menyatakan sebagai pengangguran sebanyak 4,29%.

Mengenai besaran pendapatan warga Kabupaten Lamongan yang terpilih menjadi responden memiliki pendapatan yang besarnya beragam. Adapun mayoritas responden hanya memiliki pendapatan tidak lebih tiga juta rupiah perbulan. Bahkan ada sekitar 21,55% responden mengaku tidak memiliki pendapatan setiap bulannya. Sementara yang terbanyak adalah responden berpenghasilan satu juta sampai dengan dua juta rupiah perbulan.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 840 yang telah dilakukan proses wawancara oleh 80 surveyor memiliki latar belakang Pendidikan, pekerjaan dan tentu penghasilan yang

bermacam-macam, sehingga metode yang diambil dalam penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

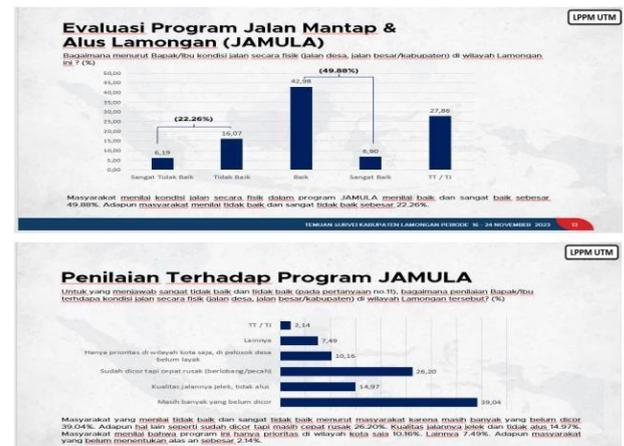
Evaluasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula)

Secara topografi, Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dengan ketinggian 0-25 mdpl sebanyak 50,17% dari keseluruhan luas wilayah sebanyak 45,68% berada pada ketinggian 25-100 mdpl seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berada di atas 100 mdpl. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar. Kondisi wilayah yang relatif datar ini akan mengakibatkan wilayah Kabupaten Lamongan bisa dapat memberikan dampak pengaruh terhadap kondisi bencana seperti bencana banjir. Banjir dapat terjadi jika didukung oleh curah hujan yang relatif tinggi. Kerusakan jalan tentu terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya ialah: 1) kerusakan akibat iklim lingkungan yaitu penuaan aspal (*binder again*) dan retakakibat perubahan suhu (*Thermally induced cracking*); 2) Kerusakan akibat roda kendaraan pada tekstur permukaan jalan yang di perlukan untuk proses abrasi; 3) Kerusakan akibat beban kendaraan pada srtuktur perkerasan yaitu ruting permukaan, ruting structural, retakakibat fatigue dan masalah bonding (*interface antara lapisan perkerasan*).

Setiap kebijakan tentu harus selalu beriringan dengan evaluasi terhadapnya, hal ini menjadi penting untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Terhadap hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura (LPPM UTM) telah menghasilkan data diantaranya, bahwa masyarakat lamongan secara umum menilai bahwa pasca dilaksanakannya program Jamula kondisi jalan secara fisik yang melakukan penilaian baik dan sangat baik sebesar 49,89%, sedangkan masyarakat yang menilai tidak baik dan sangat tidak baik sebesar 22,26%, sisanya masih ada 27,86 % responden yang tidak tahu atau tidak jawab.

Diantara alasan dalam melakukan penilaian 22,26 % responden yang menilai program JAMULA tidak baik atau sangat tidak baik adalah yang pertama masih banyak yang belum dicor. Alasan ini menempati peringkat pertama mengapa responden menilai program JAMULA tidak baik

atau sangat tidak baik. Alasan kedua adalah sudah di cor tapi cepat rusak. Hal ini berkaitan dengan kualitas pembangunan yang telah dilakukan. Kedua alasan ini merupakan mayoritas alasan yang diungkapkan responden ketika menilai program JAMULA. Adapun alasan ketiga adalah kualitas jalannya jelek atau tidak alus. Selanjutnya alasan keempat hanya prioritas di wilayah kota saja sementara di pelosok desa belum layak. Sisanya adalah alasan lainnya dan tidak tahu atau tidak jawab. Penjelasan demikian dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 3. Evaluasi dan Penilaian Program Jamula.

Program Jamula yang dilaksanakan oleh pemerintah Lamongan ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, hal ini diungkapkan oleh 87,14% responden, bahwa program tersebut perlu untuk dilanjutkan, dengan harapan jalan di Kabupaten Lamongan benar-benar dapat diperbaiki dan keadaannya segera membaik agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dengan jalan yang rusak tersebut. Masyarakat yang menilai bahwa jalan di Lamongan tidak baik dan sangat tidak baik karena masih banyak jalan yang belum dilakukan betonisasi sebesar 39,04%, Adapun penilaian terhadap kualitas jalan yang dianggap tidak baik dan tidak halus sebesar 14,97%, dan sudah dilakukan betonisasi tapi cepat rusak sebesar 26,20%. Hal ini menandakan bahwa yang harus dilakukan perbaikan kedepan dalam melaksanakan program Jamula tersebut ialah percepatan dalam pelaksanaannya dengan kualitas yang baik. ini akan menjawab keresahan masyarakat yangselama ini dirasakan terhadap keadaan jalan di Kabupaten Lamongan.

Program Jamula ini benar-benar menjadi harapan yang besar dari masyarakat Lamongan, sehingga 87,14% berharap program tersebut untuk ditingkatkan, dan hanya 6,31% yang menyatakan sudah cukup dan tidak perlu ditingkatkan.

Kepuasan terhadap program Jamula ini jika di lihat dari sebaran masing masing kecamatan terdapat 12 kecamatan yang masyarakatnya masih merasa tidak puas terhadap program tersebut, diantaranya ialah kecamatan Sarirejo, Bluluk, Kembangbahu, Ngimbang, Sambeng, Brondong, Laren, Solokuro, Maduran, Sekaran, Sukodadi dan Turi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di 12 kecamatan tersebut memerlukan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sedangkan penilaian terhadap kondisi jalan pada program Jamula ini jika dilihat dari sebaran kecamatan maka terdapat 7 Kecamatan yang masyarakatnya mayoritas menilai bahwa kondisi jalan sangat tidak baik dan tidak baik, yaitu Bluluk, Kembangbahu, Modo, Ngimbang, Sambeng, laren, Sekaran dan Turi. Sedangkan seluruh wilayah mayoritas merasa perlu adanya penambahan program Jamula tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa harapan perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Lamongan mayoritas masyarakat menginginkannya.

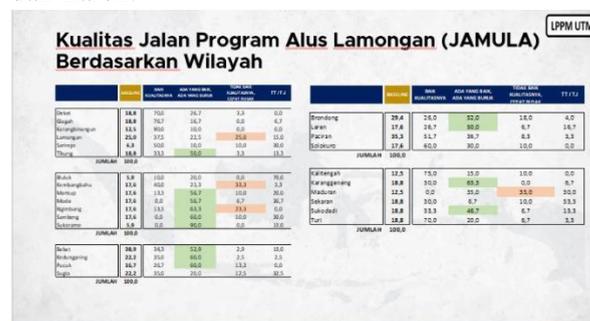


Gambar 4. Kondisi Jalan Berdasarkan Wilayah

Meskipun demikian tingkat keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan semaksimal mungkin, salah satunya melalui program Jamula tersebut. Hal ini terbukti, bahwa sepanjang kurun waktu 2021 hingga 2023 tercatat telah dilaksanakan betonisasi jalan sepanjang 97,2km. ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan jalan Lamongan yang mantap danalus seperti kepanjangan dari istilah program jamula tersebut. Berdasarkan hasil survey ditahun 2023 terdapat penilaian terhadap kualitas jalan hasil program Jamula tersebut penilaian masyarakat terhadap kualitas jalan hasil Program JAMULA. Wilayah 1: mayoritas masyarakat wilayah ini yaitu 4 Kecamatan diantara 6 kecamatan menilai kulaitas jalannya baik. Sementara mayoritas atau 50% masyarakat Kecamatan Tikung menilai kulitas jalannya ada yang baik dan buruk. Adapun yang menarik adalah pendapat masyarakat kecamatan Lamongan yang terbagi hampir rata

antara yang menilai kualitas jalan baik, ada yang baik dan buruk, serta tidak baik kualitasnya atau cepat rusak. Menariknya sebanyak 25 % masyarakat Kecamatan Lamongan menilai bahwa kualitas jalan Program JAMULA itu tidak atau cepat rusak. Wilayah 2: mayoritas masyarakat wilayah ini menilai kualitas jalan hasil Program JAMULA ada yang baik dan buruk. Sebanyak 5 kecamatan dari 7 kecamatan yang masyarakatnya menilai seperti itu.

Wilayah 3: masyarakat wilayah ini memiliki pendapat yang serupa dengan masyarakat wilayah 2 yaitu kualitas jalan hasil Program JAMULA ada yang baik dan buruk. Sebanyak 3 dari 4 kecamatan yang masyarakatnya menilai bahwa kualitas jalan hasil Program JAMULA ada yang baik dan buruk yaitu kecamatan Babat, Kedungpring, dan Pucuk. Wilayah 4: sebanyak 2 dari 6 kecamatan yang masyarakatnya menilai bahwa kualitas jalan hasil Program JAMULA ada yang baik dan buruk yaitu Kecamatan Karanggeneng dan Sukodadi. Wilayah 5: sekitar 50 % dari masyarakat wilayah ini menilai bahwa kualitas jalan hasil Program JAMULA ada yang baik dan buruk yaitu Kecamatan Brondong dan Laren.



Gambar 5. Kualitas Jalan Program Jamula.

Berbasis pada data tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menentukan pembangunan jalan dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga diawal tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Lamongan merencanakan untuk melakukan perbaikan di total 40 ruas jalan, diantaranya ialah :

Tabel. 1 Ruas Program JAMULA

| No. | Nama Ruas | No. | Nama Ruas |
|-----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1. | Dadapan-Solokuro | 21. | Dumpi-Sukobendu |
| 2. | Kedungpring-Sukobendu | 22. | Gampang-Petiin |
| 3. | Sugio – Tlanak | 23. | Gembong-Dempel |

| | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|
| 4. | Sukodadi-Plembon | 24. | Keben-Banjarmadu |
| 5. | Sumberwudi-Maduran | 25. | Kedungdadi-Kradenanrejo |
| 6. | Pucuk – Sekaran | 26. | Kedungdadi-Moropelang |
| 7. | Cangkring-Talunrejo | 27. | Kiringan-Dibee |
| 8. | Kalen-Jatipayak | 28. | Jln. Kusuma Bangsa |
| 9. | Mojorejo-Jegreg | 29. | Laren-Blimbing |
| 10. | Mojorejo-Medalem | 30. | Ngarum-Bulutengger |
| 11. | Baturono-Kembangbahu | 31. | Jln. Pahlawan |
| 12. | Bluluk-Sukorame | 32. | Pamotan-Sumberdadi |
| 13. | Brengkok-Durikulon | 33. | Pule – Sarirejo |
| 14. | Deket – Soko | 34. | Sekaran-Sungelebak |
| 15. | Soko – Dagang | 35. | Jln. Veteran |
| 16. | Soko-Karangbinangun | 36. | Kembangbahu – Sukobendu |
| 17. | Sumberdadi-Sumberkerep | 37. | Desa Jubel Kidul-Tanggung |
| 18. | Jln. Sunan Giri | 38. | Turi-Pucangro |
| 19. | Tebluru-Paciran | 39. | Sidokumpul-Tunjungmekar |
| 20. | Tunjungmekar-Sambopinggir | 40. | Lebakadi-Warukulon |

KESIMPULAN

Program jalan mantap dan alus di Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Daerah mendapatkan apresiasi bagus dari Masyarakat.

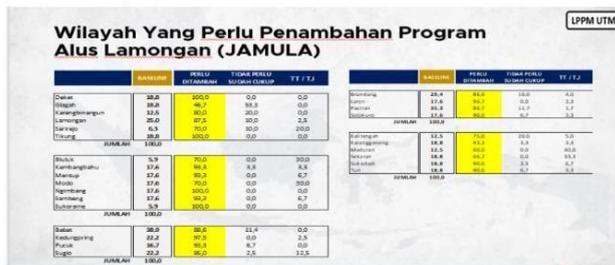
Sebanyak 87,14% warga Kabupaten Lamongan berpendapat bahwa program ini perlu dilanjutkan. Program jalan mantap dan alus ini menjadi terobosan untuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Sejak program ini bergulir, pengaruhnya atau dampaknya sangat terasa. Menurut pendapat masyarakat bahwa program yang telah dilaksanakan hingga tahun 2023 telah berhasil membuat kondisi jalan menjadi lebih baik. Sehingga banyak warga (87,14%) perlu ada peningkatan pada tahun berikutnya. Kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan. Karena kondisi jalan masih banyak yang membutuhkan perbaikan segera. Menurut pendapat Masyarakat sebanyak 39,04% kondisi jalan masih belum dicor atau aspal dan sebanyak 26,20% kondisi jalan yang sudah dicor dalam kondisi sudah berlubang dan rusak.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut rekomendasi yang dapat diberikan ialah mengenai wilayah- wilayah yang perlu segera mendapatkan Tindakan perbaikan terhadap jalan di wilayahnya berdasarkan presentase hasil dari penelitian yang telah dilakukan, rincian wilayah beserta dengan presentase tingkat memerlukan tindakan perbaikan jalan diantaranya Kecamatan Deket, Tikung, Ngimbang, Sukorame perlu untuk mendapatkan perhatian dengan presentase 100% , Glagah (46,7%), Karangbinangun (80%), Lamongan (87,5%), Sarirejo (70%), Bluluk (70%), Kembangbahu (93,3%), Mantup (93,3%), Modo (70%), Sambeng (93,3%), Babat (88,6%), Kedungpring (97,5%), Pucuk (93,3%), Sugio (85%), Brondong (86%), Laren (96,7%), Paciran (86,7%), Solokuro (90%),

Kalitengah (75%), Karanggeneng (93,3%), Maduran (60%), Sekaran (66,7%) Sukodadi (90%), Turi (90%). Berdasarkan data tersebut, diharapkan pemerintah dapat bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan jalan di Lamongan.



Gambar 6. Presentase Wilayah Skala Prioritas Pembangunan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pusat Statistik Lamongan. (2021). Kabupaten Lamongan Dalam Angka (*Lamongan Regency In Figures*). CV Aska Pustra Utama. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Lamongan. (2023). Kabupaten Lamongan Dalam Angka (*Lamongan Regency In Figures*). CV Aska Pustra Utama. Surabaya. 2023.

Subarsono, AG. (2005). Analisis kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 3/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3).

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).